



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

RENCANA KERJA TAHUNAN PPN TERNATE

2026

KATA PENGANTAR

Sebagai tindak lanjut dengan telah diterimanya Petikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan RKA-KL Satuan Kerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate Tahun Anggaran 2026, maka di tetapkan Rencana Kerja Tahunan yang berisi Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja tahun anggaran 2026.

Rencana Kerja Tahunan Satuan Kerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate tahun 2026 ini ditetapkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pencapaian kinerja dari sasaran (target) masing-masing kegiatan yang akan dilaksanakan, baik dari segi fisik maupun segi pembiayaan pada Satuan Kerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate.

Penetapan Rencana Kerja Tahunan ini Satuan Kerja PPN Ternate tahun anggaran 2026 ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai dalam pelaksanaan tugas para pengelola anggaran Satuan Kerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate.

Ternate, 19 Januari 2026
Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Ternate



Ditandatangani
Secara Elektronik

Kamarudin

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
I.I Latar Belakang.....	1
I.II Tujuan dan Sasaran	2
I.III Dasar Hukum	2
I.IV Pelaksanaan Kegiatan.....	3
BAB II. RENCANA STRATEGIS PPN TERNATE	4
II.I Visi	4
II.II Misi.....	4
II. Sasaran Strategis.....	4
BAB III. KEGIATAN.....	8
BAB IV. RENCANA PENCAPAIAN TARGET KINERJA	11
BAB V. PENUTUP	17

I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Upaya mewujudkan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan nasional dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Pembangunan sektor kelautan dan perikanan memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan, serta menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan yang sistematis dan terarah menjadi hal yang sangat penting guna memastikan setiap program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Landasan pembangunan nasional dalam jangka panjang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045. Dalam dokumen tersebut ditegaskan bahwa pembangunan kelautan diarahkan pada penguatan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan, pengelolaan wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan serta meningkatkan kemakmuran bangsa, serta pembangunan ekonomi kelautan secara terpadu melalui pemanfaatan sumber daya laut secara optimal dan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut dari arah kebijakan pembangunan nasional tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyusun Rencana Strategis (Renstra) KKP Tahun 2025–2029 sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan Renstra tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, sehingga seluruh program pembangunan kelautan dan perikanan dapat direncanakan secara terarah, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

Setelah Renstra KKP ditetapkan, diperlukan penjabaran lebih lanjut terhadap program dan kegiatan yang telah dirumuskan di dalamnya. Penjabaran tersebut dilakukan melalui penyusunan Rencana Aksi Program oleh unit utama dan Rencana Aksi Kegiatan oleh satuan kerja yang mengampu pelaksanaan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan. Dokumen perencanaan ini menjadi pedoman operasional

dalam pelaksanaan program serta menjadi dasar dalam pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan.

Sejalan dengan hal tersebut, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ternate sebagai salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan usaha perikanan tangkap, pelayanan operasional pelabuhan perikanan, serta peningkatan nilai tambah dan daya saing produk perikanan. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi tersebut secara optimal, diperlukan perencanaan kerja tahunan yang jelas, terarah, dan selaras dengan kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

Berdasarkan Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, maka PPN Ternate menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2026. Dokumen RKT ini merupakan penjabaran dari sasaran strategis dan program yang telah ditetapkan oleh unit utama, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PPN Ternate selama tahun anggaran 2026. Melalui penyusunan RKT ini diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan di PPN Ternate dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja sektor perikanan tangkap dan pelayanan pelabuhan perikanan.

I.II Tujuan

Tujuan disusun Rencana Kerja Tahunan PPN Ternate adalah sebagai acuan dan arahan dalam dukungan manajemen dalam pelaksanaan tugas teknis pada program/ kegiatan tahun 2026 mulai dari penetapan kinerja, penganggaran, dan evaluasi Program/ kegiatan.

I.III Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
5. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

I.IV Pelaksanaan Kegiatan

1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate terdiri dari Pembayaran Gaji dan Tunjangan berupa Belanja Gaji Pokok PNS, Belanja Pembulatan Gaji PNS, Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS, Belanja Tunjangan Anak PNS, Belanja Tunjangan Struktural PNS, Belanja Tunjangan Fungsional PNS, Belanja Tunjangan PPh PNS, Belanja Tunjangan Beras PNS, Belanja Uang Makan PNS, Belanja Tunjangan Umum PNS, Belanja Uang Lembur dan Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan).

2. Belanja Barang

Belanja Barang pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate terdiri dari : Belanja Keperluan Perkantoran, Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat, Belanja Honor Operasional Satuan Kerja, Belanja Barang Operasional Lainnya, Belanja Bahan, Belanja Honor Output Kegiatan, Belanja Barang Non Operasional Lainnya, Belanja Langganan Listrik, Belanja Langganan Telepon, Belanja Langganan Air, Belanja Sewa, Belanja Jasa Profesi, Belanja Jasa Lainnya, Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan, Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya, Belanja Perjalanan Biasa, dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota, Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota.

3. Belanja Modal

Belanja Modal pada Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

I. RENCANA STRATEGIS PPN TERNATE

II.I Visi

Untuk menjalankan peran strategis tersebut, visi pembangunan perikanan tangkap ditetapkan sebagai berikut: “Terwujudnya Tata Kelola Perikanan Tangkap yang Patisipatif, Berkelanjutan dan Menyejahterakan Nelayan” untuk mewujudkan “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

II.II Misi

Ditjen Perikanan Tangkap melaksanakan Misi Asta Cita sebagai agenda prioritas nasional untuk mewujudkan tercapainya sasaran pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi 8%, penurunan tingkat kemiskinan 0%, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan dengan fokus pada misi Asta Cita ke-2: Swasembada pangan dan ekonomi biru.

II.III Sasaran Kegiatan

Sasaran Startegis Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate merupakan bagian dari Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi, dengan pengukuran dan penilaian kinerjanya berbasis Balanced Scorecard (BSC). Adapun Sasaran Kegiatan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate yang terbagi dalam 5 (Lima) sasaran kegiatan,yaitu :

1. Sasaran strategis ketiga (SS-1) yang akan dicapai adalah “Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate”, dengan Indikator Kinerja: Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Juta Rupiah);
2. Sasaran kegiatan kedua (SS-2) yang akan dicapai adalah “Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate meningkat” dengan indikator kinerja: Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Ton);
3. Sasaran kegiatan ketiga (SS-3) yang akan dicapai adalah “Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate yang optimal dan bertanggung jawab”, dengan Indikator Kinerja:

- a. Persentase Permohonan Pengusahaan Yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Persen);
 - b. Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Nilai);
 - c. Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Persen);
 - d. Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Persen);
 - e. Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Nilai).
4. Sasaran kegiatan ketiga (SS-4) yang akan dicapai adalah “Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate”, dengan Indikator Kinerja:
- a. Kapal Perikanan Izin Daerah Yang Memenuhi Ketentuan (Kapal);
 - b. Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai);
5. Sasaran kegiatan keenam (SS-5) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate” dengan Indikator Kinerja:
- a. Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate yang telah dinilai WBK (Nilai);
 - b. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Persen);
 - c. Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Nilai);
 - d. Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Indeks);
 - e. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Persen);
 - f. Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Persen);
 - g. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Nilai);
 - h. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Nilai);
 - i. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Nilai).

Dalam mewujudkan Sasaran Strategis diatas, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap telah mengamanatkan satu program utama yang menaungi seluruh kegiatan perikanan tangkap, yakni “Pengelolaan Perikanan Tangkap” dan “Dukungan Manajemen”. Dari Program utama tersebut telah dijabarkan kembali ke dalam 2 (dua) Kegiatan, yaitu:

1. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan;
2. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap.

Sasaran strategis (SS), indikator kinerja utama (IKU) 2026 yang mengacu kepada balanced scorecard (BSC),

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan			
1.	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate	1. Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Rp. Juta)	2.369,031
2.	Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate Meningkat	2. Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Ton)	4.100
3.	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate yang Optimal dan Bertanggung Jawab	3. Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Persen)	100
		4. Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Nilai)	88
		5. Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (persen)	60
		6. Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (persen)	82
		7. Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Nilai)	33
4.	Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate	8. Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)	497
		9. Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)	0,28

5.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate	10.	Nilai PM Pembangunan Zona integritas Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate yang Telah Dinilai WBK (Nilai)	75,50
		11.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Persen)	86
		12.	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Nilai)	88,20
		13.	Indeks Profesionalisme ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Indeks)	84,50
		14.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate	77
		15.	Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Persen)	82
		16.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Nilai)	92,10
		17.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Nilai)	71,75
		18.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Indeks)	88,80

II. KEGIATAN

Untuk mencapai target setiap sasaran strategis, PPN Ternate telah merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun anggaran yang tertuang dalam rencana kegiatan dan anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate Tahun 2025, kegiatan PPN Ternate mendapat alokasi anggaran APBN sebesar Rp 13.091.588.000 dan terbagi dalam dua output kegiatan utama, yaitu:

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Pagu Anggaran 2026 (Rp.)
	Pengelolaan Perikanan Tangkap			13.091.588.000
A.	032.03.HB Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan			1.293.563.000
1.	2338.Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	2338.BGA	2 Lembaga	1.293.563.000
		2338.BGA.002	Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar	1.293.563.000
B.	032.03.WA Program Dukungan Manajemen			11.798.025.000
1.	2342.Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	2342.CAN	1 Unit	17.500.000
		2342.CAN.955	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	17.500.000
		2342.EBA	1 Layanan	11.555.677.000
		2342.EBA.994	Layanan Perkantoran	11.555.677.000
		2342.EBB	2 Unit	224.848.000
		2342.EBB.951	Layanan Sarana Internal	50.000.000
		2342.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	174.848.000

A. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan

Output Kegiatan ini adalah:

1. Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar, output kegiatannya yaitu:

- a. Pelaksanaan Tata kelola dan Operasional kesyahbandaran di pelabuhan perikanan,
 - Penyiapan dan Pelaksanaan Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan.
 - Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kesyahbandaran Dalam Rangka dalam rangka mendukung PNBP Pasca produksi dan Penangkapan Ikan Terukur (PIT).
 - Sosialisasi Kesyahbandaran Terkait Pengawakan Kapal Perikanan.
- b. Pelaksanaan Tata Kelola dan Operasional Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) di Pelabuhan Perikanan,
 - Monitoring dan Evaluasi SHTI.
- c. Pelaksanaan tata kelola dan operasional cara penanganan ikan yang baik (CPIB) dan Inspeksi Pembongkaran ikan di pelabuhan perikanan,
 - Sosialisasi Cara Penanganan Ikan yang baik.
 - Operasional Pembinaan Mutu di Pelabuhan Perikanan.
- d. Pelaksanaan tata kelola dan operasional perusahaan di pelabuhan perikanan,
 - Bahan dan Perlengkapan Mesin Pendingin.
 - Bahan dan Perlengkapan Bengkel.
 - Publikasi/Promosi Pelabuhan Perikanan.
 - Temu Usaha Perikanan dalam rangka mengevaluasi tingkat kepatuhan dan tingkat pelayanan.
 - Peningkatan Pelayanan Publik.
 - Review SOP dan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan.
 - Sosialisasi Mekanisme Sewa Lahan dan Bangunan.
 - Monev SPBUN dan kegiatan yang mendukung layanan perusahaan.
 - Audit Surveillance Sertifikasi ISO 9001:2015.
- e. Pelaksanaan tata kelola dan operasional K5 di Pelabuhan Perikanan,
 - Operasional K5 di Pelabuhan Perikanan.
 - Gerakan Bersih Pelabuhan.
 - Audit Surveillance Sertifikasi ISO 14001:2015.
 - Sosialisasi dan Simulasi Pemadaman Kebakaran.
 - Rapat Koordinasi K5 di Pelabuhan Perikanan.

- f. Pelaksanaan tata kelola dan operasional PIPP di pelabuhan perikanan,
 - Pengolahan dan verifikasi data PIPP di pelabuhan perikanan.
 - Pendampingan UPT Pusat pada Pelabuhan Perikanan Binaan dalam rangka Implementasi PIT dan PNBP Pasca Produksi.
 - Rapat Koordinasi Pelaksanaan PIPP di Pelabuhan Binaan.
- B. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap, terdiri dari:
 - 1. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi.
 - a. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi.
 - Fasilitas penunjang.
 - 2. Layanan Perkantoran.
 - a. Gaji dan Tunjangan.
 - Pembayaran gaji dan tunjangan.
 - b. Operasional dan Pemeliharaan Kantor.
 - Langganan Daya dan Jasa.
 - Pemeliharaan Kantor.
 - Pembayaran terkait pelaksanaan Operasional Kantor.
 - 3. Layanan Sarana Internal.
 - a. Pengadaan sarana perkantoran.
 - Fasilitas penunjang.
 - 4. Layanan Prasarana Internal.
 - a. Pengadaan dan Rehabilitasi prasarana perkantoran.
 - Pembangunan dan Pengembangan Prasarana Pelabuhan.

III. RENCANA PENCAPAIAN TARGET KINERJA

1. SASARAN KEGIATAN

a) Sasaran Kegiatan (SS-1) : Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate.

Indikator kinerja nilai PNBP sektor perikanan tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate adalah Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate. Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan Perikanan adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan. Indikator kinerja ini memiliki target tahun 2026 sebesar Rp. 2.369,031 juta.

b) Sasaran Kegiatan (SS-2) : Produktivitas Perikanan Tangkap Di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate Meningkat.

Indikator Kinerja Utama Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate merupakan indikator yang menunjukkan volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate. Jumlah produksi berasal dari produksi perikanan tangkap (laut dan perairan umum) di seluruh provinsi di Indonesia dalam bentuk basah serta jumlah produksi pendaratan ikan dari kapal penangkap, kapal pengangkut serta ikan kiriman yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate. Realisasi volume produksi perikanan di PPN Ternate dilaporkan secara berkala setiap bulan dengan target tahun 2026 sebesar 4.100 ton.

c) Sasaran Kegiatan (SS-3) : Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate yang Optimal dan Bertanggung Jawab.

Indikator kinerja pada sasaran kegiatan ini antara lain:

- Persentase Permohonan Pengusahaan Yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate dengan target tahunan 100 persen. Indikator kinerja ini merupakan fungsi untuk melaksanakan analisa dan evaluasi permohonan pengusahaan dalam pelayanan sewa tanah dan/atau bangunan.

- Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate dengan target per triwulan sebesar 88, nilai yang merupakan upaya untuk menilai tingkat kinerja operasional yang didasarkan atas ketentuan kriteria teknis dan operasional kelas pelabuhan perikanan (sesuai SK Dirjen Perikanan Tangkap No 20/KEP-DJPT/2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan, perubahan atas SK Dirjen Perikanan Tangkap No. 432/DPT.3/OT.220.D3/I/2008). Sebagai bagian dari kegiatan manajemen untuk menilai kinerja Pelabuhan Perikanan. Acuan dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat perikanan. Ruang lingkup meliputi : 1) administrasi dan sistem informasi; 2) fasilitas pelabuhan perikanan; 3) pelayanan umum; 4) investasi dan industri.
- Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate dengan target tahun 2026 sebesar 60 Persen. Indikator kinerja ini adalah indikator kinerja yang menunjukkan perhitungan jumlah persentase Persetujuan Berlayar (PB), Surat Tanda Bukti Lapora Kedatangan (STBLK), dan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI).
- Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate dengan target tahun 2026 sebesar 82 persen yang diambil dari perhitungan luas pengembangan fasilitas yang eksisitng saat ini dibandingkan dengan jumlah luas pelabuhan sesuai masterplan.
- Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate dengan target per triwulan adalah 33 persen yang berbasis pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, dan penginputan program lingkungan di pelabuhan perikanan pada aplikasi SELARASKAN.

d) Sasaran Kegiatan (SS-4) : Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate.

Indikator kinerja pada sasaran kegiatan ini antara lain:

- Kapal Perikanan Izin Daerah Yang Memenuhi Ketentuan yang memiliki target tahun 2026 sebanyak 497 Kapal. Indikator kinerja ini jumlah kapal yang diterbitkan dokumen kapal perikanannya (sertifikat kelaikan kapal)

oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate yang diterbitkan dan dihitung dari tahun 2023 hingga 2026.

- Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan yang memiliki target 0,28. Nilai ini merupakan indikator yang menunjukkan pemenuhan persyaratan bekerja awak kapal perikanan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021, serta Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.2541/MEN-KP/XII/2024. Tujuan implementasi indikator ini adalah untuk menjamin kepatuhan regulasi serta meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan awak kapal perikanan.

e) Sasaran Kegiatan (SS-5) : Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate.

Indikator kinerja pada sasaran kegiatan ini adalah:

- Indikator Nilai PM Pembangunan Zona Integritas Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate yang telah Dinilai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dengan target nilai tahun 2026 yaitu 75,5. Indikator ini adalah nilai hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas yang mencakup 6 Area Pengungkit dan 2 Area Komponen Hasil serta mengacu kepada Juknis Pengawasan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
- Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate yang merupakan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Ditjen Perikanan Tangkap berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang telah ditindaklanjuti, dengan target 86 persen.
- Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate adalah indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja dengan target tahun 2026 adalah 88,20.
- Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate yang memiliki target 84,50. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN

berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Nilai IP ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yakni : Kualifikasi (diukur dari riwayat Pendidikan); Kompetensi (diukur dari riwayat pengembangan kompetensi); Kinerja (diukur dari penilaian prestasi kerja PNS); dan Disiplin Pegawai (diukur dari riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami).

- Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate dengan target 77 Persen. Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan unit kerja mandiri.
- Indikator Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat Pengelolaan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan target 82 Persen.
- Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate memiliki target tahun 2026 adalah 92,10. Indikator ini ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran dengan memperhitungkan 13 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.
- Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas

perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Indikator Kinerja ini memiliki target 71,75.

- Indikator Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik (Permen PAN dan RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik). Indikator Kinerja ini memiliki target tahun 2026 sebesar 88,80 Nilai.

2. RENCANA AKSI

MATRIKS RENCANA AKSI
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE
TAHUN 2026

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	UNIT PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	TARGET KEGIATAN	SATUAN TARGET KEGIATAN	TERGET KEGIATAN BERKALA											
								Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okto	Nov	Des
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate	1 Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (juta rupiah)	Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	Pelaksanaan tata kelola dan operasional perusahaan di pelabuhan perikanan	Rp 272.289.000	12	Bulan												
2	Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate Meningkat	2 Volume Produksi Perikanan Tangkap Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (ton)	Tim Kerja Operasional Pelabuhan	Pelaksanaan tata kelola dan operasional cara penanganan ikan yang baik (CPIB) dan Inspeksi Pembongkaran ikan di pelabuhan perikanan	Rp 57.878.000	12	Bulan												
3	Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate	3 Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan (kapal)	Tim Kerja Kesyahbandaran	Fasilitasi Pemeriksaan Kelaikan kapal Perikanan		12	Bulan												
		4 Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (nilai)	Tim Kerja Kesyahbandaran	Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan	Rp 10.180.000	12	Bulan												

16

IV. PENUTUP

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate merupakan dokumen perencanaan jangka pendek yang disusun berdasarkan dokumen rencana strategis untuk meningkatkan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate yang terstandar. Rencana Kerja Tahunan ini memuat semua Program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026, baik yang bersifat strategis maupun yang bersifat rutin.

Dengan adanya RKT ini Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate akan lebih mudah melaksanakan pengelolaan program/kegiatan, implementasi, monitoring dan evaluasi yang baik, terstruktur serta terukur sehingga memudahkan dalam melaksanakan seluruh kegiatan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate dengan baik dan terencana.

Demikian Rencana Kerja Tahunan dibuat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Ternate, 19 Januari 2026
Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Ternate



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Kamarudin